

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia akuntansi saat ini semakin pesat. Perkembangan tersebut banyak membawa manfaat bagi masyarakat. Tetapi, masih terdapat beberapa titik rawan yang dimungkinkan terjadinya kecurangan. Adanya celah yang dimungkinkan terjadinya kecurangan tersebut seringkali dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan kecurangan baik dari segi penyimpangan dalam mengelola keuangan, penyalahgunaan aset, dan manipulasi laporan keuangan. Sehingga akibat dari kecurangan tersebut menimbulkan kerugian bagi Negara.

Kerugian bagi Negara tersebut terbukti dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyimpulkan bahwa pada Tahun 2016 terdapat sebanyak 238 kasus dengan jumlah nilai kerugian Negara sebesar Rp. 1 triliun diantaranya (1) suap menyuap, sebanyak 33 kasus dengan jumlah nilai kerugian Negara sebesar Rp. 32,4 miliar, (2) penggelapan dalam jabatan, sebanyak 3 kasus dengan jumlah nilai kerugian Negara sebesar Rp. 2,3 miliar, (3) pemerasan, sebanyak 7 kasus dengan jumlah nilai kerugian Negara sebesar Rp. 20,5 miliar, (4) gratifikasi, sebanyak 2 kasus dengan jumlah nilai kerugian Negara sebesar Rp. -, (5) benturan dalam pembelanjaan, sebanyak 2 kasus dengan jumlah nilai kerugian Negara sebesar Rp. -, dan (6) belum diketahui, sebanyak 197 kasus dengan jumlah nilai kerugian Negara sebesar Rp. 442 miliar (ICW, 2017).

Salah satu kasus korupsi yang menjadi sorotan di Tahun 2018 adalah adanya kasus dugaan korupsi di Solok Selatan yang melibatkan Bupati Solok

Selatan (MZ), satu orang dari pihak swasta (MYK), dan beberapa pejabat di Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan karena perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pertahanan yang berupa pengadaan paket pekerjaan pembangunan Jembatan Ambayan dan Masjid Agung Solok Selatan. Uang dan barang tersebut diduga diberikan untuk memenangkan Perusahaan MYK dalam tender pengadaan. MZ diduga menerima pemberian uang dan barang terkait proyek Jembatan Ambayan sejumlah kurang lebih Rp. 460 juta dalam rentang waktu April-Juni 2018 dan beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah menerima uang sejumlah Rp. 315 juta terkait dengan proyek pembangunan Masjid Agung Solok Selatan (kpk.go.id, 2019). Temuan ini seolah ingin membenarkan hasil pemantauan ICW sebelumnya bahwa korupsi masih menjadi salah satu faktor utama yang merugikan Negara.

Pemerintah juga telah berupaya menekan terjadinya kecurangan dan memberikan efek jera dengan memberikan ancaman dengan pasal 3 UU 31/1999 yang berbunyi “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar.

Dari data dan kasus yang diungkapkan diatas menunjukkan bahwa kecurangan (*fraud*) masih menjadi salah satu modus yang banyak memerlukan perhatian. Penyebab kecurangan (*fraud*) salah satunya yakni rendahnya moral

seseorang. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider (Malle, 2011) yaitu atribusi internal. Atribusi internal adalah pengaruh yang berasal dari dalam diri seseorang individu, misalnya: sifat, sikap, dan kemampuan. Seseorang dengan tingkat moral yang rendah dapat melakukan kecurangan, disebabkan oleh sifat manusia yang tidak akan pernah puas dengan apa yang telah diperoleh saat itu serta keinginan yang kuat untuk mendapatkan yang lebih pada akhirnya akan mengalahkan akal sehatnya, apalagi jika ada masalah yang sangat mendesak misalnya masalah keuangan atau ekonomi dengan cara apapun akan dilakukan untuk menutupi masalah tersebut. Sehingga akan memunculkan tindakan yang akan melanggar hukum demi kepentingan pribadinya, dimana menurut penelitian (Wilopo, 2006), (Indriastuti, *et.,al*, 2016), dan (Suryaningtyas, 2016) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya, apabila moralitas individu semakin tinggi maka dapat menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan dalam penelitian (Budiantari, *et.,al*, 2017) menunjukkan bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Kemudian, penyebab kecurangan yang lainnya yakni karena sistem pengendalian internal yang lemah. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider (Malle, 2011) yaitu atribusi eksternal. Atribusi eksternal adalah faktor pendukung atau faktor penyebab perilaku seseorang yang berasal dari lingkungan atau situasi tertentu, misalnya: peluang, keberuntungan, dan kondisi yang menguntungkan. Suatu kesempatan atau situasi (misalnya: sistem pengendalian internal yang lemah, pengawasan yang kurang baik) dapat dijadikan kesempatan bagi para pelaku kecurangan atau

oknum untuk secara mudah melakukan tindakannya sesuka hati. Banyak kasus aparat pemerintah yang berlaku curang karena terdapat peluang atau kesempatan yang menjadi celah bagi para pelaku untuk secara bebas melakukan kecurangan, misalnya: manipulasi, pemalsuan ataupun penipuan, dimana menurut penelitian (Ariani, *et.,al*, 2014), (Astuti, *et.,al*, 2017), dan (Eliza, 2015) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin tinggi sistem pengendalian internal maka tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi semakin berkurang. Sedangkan dalam penelitian (Ahriati, *et.,al*, 2015) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Meskipun sistem pengendalian internal diterapkan ataupun tidak diterapkan hal tersebut tidak akan berpengaruh pada kecenderungan kecurangan akuntansi karena ada faktor lain yang mempengaruhinya yaitu perilaku tidak etis yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Selanjutnya, penyebab kecurangan yang lainnya yakni karena komitmen yang kurang kuat dalam diri seorang individu terhadap organisasinya. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider (Malle, 2011) yaitu atribusi internal. Atribusi internal adalah pengaruh yang berasal dari dalam diri seseorang individu, misalnya: sifat, sikap, dan kemampuan. Komitmen yang kurang kuat dalam diri seorang individu terhadap organisasinya juga diasumsikan menjadi penyebab terjadinya kecurangan, karena kurangnya rasa keterlibatan atau hanya memprioritaskan gaji sehingga mengakibatkan kurangnya rasa tanggungjawab terhadap pekerjaannya didalam organisasi tersebut, dimana menurut penelitian (Pristiyanti, 2012), (Mustikasari, 2013), dan (Faisal, 2013)

yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap tindakan *fraud* di sektor pemerintahan. Artinya, semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi tempatnya bekerja maka akan semakin rendah tingkat terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Eliza, 2015) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, artinya semakin baik moralitas individu maka tingkat kecurangan akuntansi semakin berkurang. Sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, artinya semakin efektif sistem pengendalian internal maka tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi semakin berkurang. Akan tetapi peneliti menambah variabel Komitmen Organisasi. Alasan peneliti menambah komitmen organisasi karena komitmen organisasi berhubungan dengan teori atribusi internal yang menyatakan bahwa komitmen yang kurang kuat dalam diri seorang individu terhadap organisasinya diasumsikan menjadi penyebab terjadinya kecurangan, karena kurangnya rasa keterlibatan atau hanya memprioritaskan gaji sehingga mengakibatkan kurangnya rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan didalam organisasi tersebut. Semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi maka tingkat kecurangannya semakin rendah. Sebaliknya jika pegawai tersebut memiliki komitmen yang rendah terhadap organisasi maka kecurangannya akan semakin tinggi.

Alasan yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Bangkalan adalah karena dengan adanya kasus kecurangan yang pernah terjadi yaitu korupsi dana pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2014 pada

Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkab Bangkalan. Bagus Hariyanto selaku Kepala Bagian Administrasi Pemkab setempat, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan itu, karena diduga menyalahgunakan keuangan Negara. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Negara mengalami kerugian mencapai Rp. 3,2 miliar akibat korupsi tersebut. Semua anggaran di *mark-up* dan nota pembelanjaan dimanipulasi. Dana pengadaan barang dan jasa di bagian umum itu seperti belanja makanan dan minuman, alat tulis kantor (ATK) serta percetakan. Total anggaran pengadaan barang dan jasa di bagian umum pada tahun 2014 sebesar Rp. 5,8 miliar. Namun, sebanyak Rp. 3,2 miliar atau lebih atau lebih separuh dana tersebut disalahgunakan oleh tersangka (Surabaya.bpk.go.id, 2016).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecurangan cenderung dilakukan karena kurang adanya nilai moralitas individu di dalam melakukan tugas atau wewenangnya. Selain itu, terlihat juga masih kurang efektifnya sistem pengendalian internal serta perlunya unsur komitmen organisasi yang baik agar dapat mempertahankan organisasinya untuk membantu pencapaian terwujudnya organisasi tersebut. Dengan kata lain, tindakan dan tingkah laku yang dibangun berdasarkan nilai moralitas individu, sistem pengendalian internal yang harus diterapkan secara efektif, dan komitmen organisasi yang harus dimiliki oleh anggota untuk pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian untuk menguji sejauh mana pengaruh moralitas individu, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini difokuskan pada bagian keuangan dengan alasan

karena bagian ini memegang peranan penting dalam kontrol keuangan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Untuk mengetahui komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bukti empiris, tambahan pemikiran dalam pengembangan keilmuan dibidang akuntansi terkait dengan kecenderungan kecurangan akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
 - b. Dapat digunakan untuk tambahan referensi penelitian yang akan datang dengan topik dibidang akuntansi forensik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dari penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- b. Bagi objek penelitian, sebagai masukan kontribusi pemikiran dalam bidang keuangan dan pencegahan dalam rangka meminimalkan terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi.